

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Nur. 2016. "Pengembangan Dosen di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Amal Ilmiah Yapis Wamena Kabupaten Jayawijaya". *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Vol. 3 No. 2, dapat diakses pada 8 Januari 2023, dapat diakses melalui link <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/634618>.
- Arsyad, Jawade Hafidz. 2013. *Korupsi dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asnaini dan Riki Aprianto. 2019. "Kedudukan Harta dan Implikasinya dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis". *IAIN Bengkulu*. Vol. 5 No. 1, dapat diakses melalui link <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/download/1713/1449>.
- Dalilah, Elih, and Vishnu Juwono. 2021. "Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program Marsh & McConnell." *Integritas : Jurnal Antikorupsi*. Vol. 7 No. 2, dapat diakses melalui link <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/861>.
- Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (DPN – LPPNRI). 2012. *Transparansi bagi Penyelenggara Negara*. Jakarta: DPN – LPPNRI.
- Dewantari, Nadia Ayu dan Itok Dwi Kurniawan. 2021. "Implementasi Kebijakan Pendataan Penduduk Nonpermanen sebagai Upaya Tertib Administrasi Kependudukan Di Kota Surakarta". *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol. 2 No. 5, dapat diakses melalui link <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/919/718>.
- Dictionary by Merriam-Webster. Link <https://www.merriam-webster.com/dictionary/implement> diakses pada tanggal 4 Desember 2022 pada pukul 17.00.
- Djuniarti, Evi. 2017. "Hukum Harta Bersama ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol 17 No. 4, dapat diakses melalui link <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/361/pdf>
- E-LHKPN. [online]. Link <https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/petakepatuhan>. Diakses pada tanggal 1 November 2022 pada pukul 15.00.

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Gabriela, et. al. 2023. “Efektivitas Penerapan Aturan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”. *Lex Administratum*. Vol. XI No. 4, dapat diakses melalui link <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/48645/42892/112710>.
- Hadjon, Philipus M., et. al. 2011. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, Andi. 1984. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: PT Gramedia.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan ke 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imam, Raden dan Moris Adidi. 2017. “Abuse of Power: Tinjauan terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Publik di Indonesia”. *Publika*. Vol. 3 No. 1, dapat diakses melalui link <https://repository.uir.ac.id/2703/1/ABUSE%20OF%20POWER.pdf>.
- Istiqhfarah, Laila, et.al. 2021. “Implementasi Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDEKa) dalam Percepatan Kemandirian Desa di Desa Pamolokan Kabupaten Sumenep”. *Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wiraraja* Vol. 16 No. 1, dapat diakses melalui link <https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FISIP/article/download/1599/1174/>.
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. [online]. Link <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak> diakses pada tanggal 17 Desember 2022 pada pukul 20.00.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. [online]. Link <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harta> diakses pada tanggal 5 Oktober 2023 pada pukul 15.00 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. [online]. Link <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi> diakses pada tanggal 4 Desember 2022 pada pukul 15.00 WIB.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. [online]. Link <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban> diakses pada tanggal 17 Desember 2022 pada pukul 20.20 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. [online]. Link <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korup> diakses pada tanggal 12 Oktober 2023 pada pukul 15.00 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. [online]. Link <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi> diakses pada tanggal 12 Oktober 2023 pada pukul 15.10 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. [online]. Link <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/koruptor> diakses pada tanggal 12 Oktober 2023 pada pukul 15.20 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. [online]. Link <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/negara> diakses pada tanggal 6 Oktober 2023 pada pukul 18.00 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. [online]. Link <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelenggara> diakses pada tanggal 6 Oktober 2023 pada pukul 17.45 WIB.
- Karsona, Agus Mulya dan Indah Sri Utari. 2018. *Korupsi dan Integritas dalam Nanang T. Puspito, et. al. Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemenristekdikti, dapat diakses melalui link <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/buku-pendidikan-antikorupsi-untuk-perguruan-tinggi>.
- Manegeng, Rebecca Vionna. 2014. "Penghalangan dan Pencegahan terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia". *Jurnal Lex Et Societatis*. Vol. 2 No.2, dapat diakses melalui link <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexetsocietatis/article/view/6184>.
- Masrina, et. al. 2023. "Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 9 No. 1, dapat diakses melalui link <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/6538/3227>.
- Merriam-Webster Dictionary. [online]. Link <https://www.merriam-webster.com/dictionary/implement> diakses pada tanggal 4 Desember 2022 pada pukul 17.00 WIB.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pramono, Joko. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press, dapat diakses melalui link http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi-....pdf.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat. 2017. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

Rafi'i, Akhmad, et. al. 2020. "Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi pada Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara)". *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 6 No. 1, dapat diakses melalui link <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JAP/article/download/682/579>.

Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Cetakan ke 3. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 *tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 *tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Rolos, Readel, *et.al.* 2021. “Implementasi Program Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Bantuan Penyelesaian Pendidikan Di Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara)”. *Jurnal Governance* Vol. 1 No. 1, dapat diakses melalui link <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/governance/article/download/34569/32453>.
- Sahara, Wahyuni. “Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara”. Kompas. 23 Agustus 2021. Online. Internet. 23 Desember 2022, dapat diakses melalui link <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-%20bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis>.
- Salim, Wilson Gunawan. 2020. “Kepastian Hukum terhadap Tidak Dilaksanakannya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi”. *Lex Jurnalica*. Vol. 17 No. 1, dapat diakses melalui link <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/download/3110/2770>.
- Simandjuntak, Marcella Elwina. 2018. *Upaya Pemberantasan Korupsi dalam Nanang T. Puspito, et. al. Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Edisi Revisi Jakarta: Kemenristekdikti, dapat diakses melalui link <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/buku-pendidikan-antikorupsi-untuk-perguruan-tinggi>.
- Soerjowinoto, Petrus, *et. al.* 2020. *Metode Penulisan Karya Hukum*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Spora, Tim. *Pengantar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diakses melalui link <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/tata-kelola-pemerintahan/buku/pengantar-laporan-harta-kekayaan-pejabat-negara-lhkpn> diakses pada tanggal 16 November 2022 pada pukul 19.00.

- Sumarno. 2020. "Urgensi UU Etika Penyelenggara Negara". *Jurnal Kajian Ilmu Sosial*. Vol. 1 No. 1, dapat diakses melalui link <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/kais/article/download/6286/4065>.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi*. Cetakan ke 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryono, Ahmad. "Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Progresif sebagai Tindakan Pencegahan Korupsi". *Publikasi Ilmiah*, dapat diakses melalui link https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/9477/AH_AMAD%20SRUYONO.pdf?sequence=1.
- Swandari, Arin, *et. al.* 2019. *KPK Berdiri untuk Negeri*. Jakarta: Buku Kompas.
- Taufik, Mhd dan Isril. 2013. "Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa". *Jurnal Kebijakan Publik*. Vol. 4 No. 2, dapat diakses melalui link <https://jkp.ejournal.umri.ac.id/index.php/JKP/article/download/2194/2160>.
- Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2017. *Laporan Tahunan 2017: Demi Indonesia dan Untuk Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diakses melalui link https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=show_detail&id=9190.
- Tim Penyusunan Laporan Tahunan KPK 2018. *Laporan Tahunan 2018*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diakses melalui link https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=show_detail&id=9567.
- Tim Penyusunan Laporan Tahunan KPK 2019. *Laporan Tahunan 2019: Merangkai Simfoni Melawan Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diakses melalui link https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=show_detail&id=10704.
- Tim Penyusunan Laporan Tahunan KPK 2020. *Laporan Tahunan 2020: Tanpa Tatap Muka*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diakses melalui link https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=show_detail&id=11276.
- Waluyo, Bambang. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wardani, Ach. Khiarul Waro, *et. al.* 2021. *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*. Kediri: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, dapat diakses melalui link <http://puskumham.iainkediri.ac.id/wp->

content/uploads/2023/05/DIKTAT-PENGANTAR-ILMU-HUKUM_VERSI-CETAK.pdf.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Cetakan 1. Yogyakarta: CAPS.

